

# ASPIRASI **kita**

EDISI 5 - MEI 2025



## **Apresiasi Larangan Diskriminasi Usia dalam Rekrutmen Pekerjaan,**

*Lilik: Jangan Sebatas Imbauan Administratif*



## APRESIASI PREDIKAT WTP PEM PROV, FRAKSI PKS JATIM JUGA SOROTI KASUS KREDIT FIKTIF BANK JATIM CABANG JAKARTA

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Timur memberikan apresiasi atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Pemprov Jawa Timur tahun anggaran 2024. Namun di balik apresiasi tersebut, Fraksi PKS juga menyampaikan catatan kritis terkait tata kelola keuangan daerah, khususnya dalam kasus kredit fiktif di Bank Jatim Cabang Jakarta.

Dalam rapat paripurna DPRD Jatim yang membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024, Rabu (14/5), Fraksi PKS menyebut bahwa opini WTP merupakan indikator positif secara administratif.



Namun predikat tersebut belum tentu mencerminkan bersihnya pengelolaan keuangan dari potensi penyimpangan. "Capaian opini WTP akan menjadi kurang bermakna apabila masih ditemukan tindakan moral hazard seperti kasus kredit fiktif yang terjadi di Bank Jatim Cabang Jakarta," ujar juru bicara Fraksi PKS, Agus Cahyono, dalam penyampaian pandangan umumnya.

Fraksi PKS menyebutkan, kasus kredit fiktif tersebut diduga telah merugikan keuangan daerah hingga Rp569,4 miliar. Dana tersebut seharusnya digunakan untuk mendukung proyek-proyek melalui kredit modal kerja, namun ternyata proyek tersebut tidak pernah ada. Atas kejadian tersebut, Fraksi PKS mendorong adanya evaluasi dan pembersihan menyeluruh terhadap tata kelola keuangan daerah, baik yang berada di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) maupun di luar OPD seperti BUMD.

"Kami meminta pemerintah provinsi untuk memberikan perhatian serius agar kejadian serupa tidak terulang. WTP bukanlah jaminan bahwa sistem sudah bersih, karena indikasi penyimpangan tetap bisa terjadi," tegas Fraksi PKS. Di sisi lain, Fraksi PKS juga memberikan sejumlah catatan terhadap realisasi APBD 2024, termasuk lonjakan saldo akhir kas dan surplus anggaran yang dinilai berpotensi menimbulkan idle cash dan menurunkan kepercayaan publik. Mereka juga menyarankan agar surplus anggaran diarahkan pada sektor produktif seperti penguatan SDM, kesehatan, dan revitalisasi pertanian.

Fraksi PKS menutup pandangannya dengan harapan agar Pemprov Jatim memberikan penjelasan yang jernih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik atas berbagai catatan yang disampaikan. "Semoga laporan ini menjadi momentum untuk perbaikan tata kelola keuangan daerah demi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur," pungkas Fraksi PKS.



## **FRAKSI PKS SOROTI TARGET RPJMD JATIM 2025–2029 DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD JATIM: KURANG OPTIMISTIK!**

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur, melalui juru bicaranya, Khusnul Khuluk, menyampaikan pandangan kritis terhadap target-target yang tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur 2025–2029. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur yang digelar pada Rabu (14/5). Dalam pandangan umumnya, Fraksi PKS menilai bahwa sejumlah target makro pembangunan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkesan kurang optimistik dan tidak mencerminkan semangat lompatan kemajuan yang diharapkan masyarakat Jatim dalam lima tahun ke depan.

Menurut Perpres 12 tahun 2025 lampiran I dan IV RPJMN 2025–2029, target pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2025–2029 rata rata sebesar 6,9% dan tahun 2029 sebesar 8,0%. Sedangkan pada dokumen rancangan akhir RPJMD Jawa Timur, target pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2025 sebesar 4,8–5,2% dan tahun 2029 sebesar 5,1–6,3%. Fraksi PKS menilai, penetapan target pertumbuhan PDRB Jawa Timur dalam Rancangan RPJMD ini masih di bawah target RPJMN, jika dibiarkan maka akan menghambat pencapaian target nasional 8%, karena besarnya kontribusi Jawa Timur terhadap perekonomian nasional selama ini (14% -15 %).

Khusnul menyampaikan, Fraksi PKS menilai RPJMD harus disusun secara ekspansif dan optimistik selaras dengan target nasional dan sejalan dengan temuan awal berdasarkan data BPS bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan I tahun 2025 year on year sebesar 5,0% sudah melampaui nasional yang hanya sebesar 4,87%. “Fraksi PKS memandang bahwa target pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih berada dalam batas aman yang konservatif, padahal Jatim memiliki potensi besar untuk bergerak lebih cepat,” ujar Khusnul Khuluk dalam penyampaian pandangan umum fraksi. Fraksi PKS juga menyoroti belum adanya strategi terobosan yang konkret dalam dokumen rancangan awal RPJMD.

“Kami tidak melihat adanya keberanian untuk menetapkan program unggulan yang bisa menjadi legacy pemerintahan mendatang, baik dalam sektor pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, maupun transformasi digital,” lanjutnya. Selain itu, Fraksi PKS mendorong agar RPJMD 2025–2029 memperkuat pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan dan potensi lokal, khususnya di wilayah tapal kuda dan matraman yang selama ini tertinggal dibanding wilayah barat Jatim. Fraksi PKS menyatakan siap memberikan catatan dan masukan konstruktif dalam pembahasan lebih lanjut agar dokumen RPJMD yang dihasilkan benar-benar mencerminkan harapan rakyat Jawa Timur dan membawa kemajuan signifikan dalam lima tahun ke depan.

**“RPJMD bukan hanya soal administrasi, tetapi soal arah masa depan. Jangan sampai RPJMD ini menjadi dokumen formalitas yang tidak menggugah semangat perubahan dan akselerasi,” tegas Khusnul.**



## **FRAKSI PKS DPRD JATIM SOROTI KETIMPANGAN WILAYAH DAN SEKTOR EKONOMI LESU DALAM PANDANGAN AKHIR ATAS LKPJ GUBERNUR 2024**

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Timur menyampaikan sejumlah catatan kritis dalam pandangan akhirnya terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 yang dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD pada Senin (19/5). Juru bicara Fraksi PKS, Lilik Hendarwati, menyoroti capaian indikator kinerja utama (IKU) yang belum optimal, terutama dalam hal ketimpangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi. Dalam pandangan akhirnya, Fraksi PKS menyebut capaian indeks theil dan indeks gini tahun 2024 tidak memenuhi target yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD. Fraksi menilai, kebijakan fiskal dan program APBD belum cukup menjadi pemicu untuk menurunkan ketimpangan ekonomi maupun pertumbuhan wilayah. pembangunan harus dilakukan secara lebih fundamental. Pemerintah Provinsi perlu segera memetakan kebutuhan infrastruktur dasar di kabupaten/kota, memperkuat program sosial berbasis desa, serta mendorong akses permodalan bagi UMKM," ujar Ketua Fraksi PKS Jatim itu. PKS juga menilai pemerintah belum mengidentifikasi dengan baik sektor-sektor yang mengalami penurunan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Meskipun ekonomi tumbuh 4,93%, angka ini sedikit lebih rendah dibanding tahun sebelumnya dan masih dalam rentang bawah dari target.

“Pemerintah perlu membangun kolaborasi dengan banyak pihak untuk memperkuat sektor unggulan seperti UKM, pertanian, serta memperluas pangsa ekspor sektor industri pengolahan dan perdagangan,” tambahnya. Fraksi PKS juga menyoroti kualitas penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Meski angka pengangguran terbuka menurun menjadi 4,1% dan kemiskinan ke angka 9,56%, mereka menilai perlu fokus pada kelompok lulusan pendidikan tertentu seperti SMK dan perguruan tinggi, serta pada kabupaten/kota dengan angka kemiskinan dan pengangguran di atas rata-rata. Fraksi PKS meminta adanya sinergi lebih kuat antara Pemprov dengan Pemkab/Pemkot agar program pengentasan kemiskinan tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.

Selain itu, Fraksi PKS juga menyinggung belum maksimalnya tindak lanjut atas rekomendasi DPRD pada LKPJ 2023 maupun 2024, termasuk temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait pengelolaan aset, administrasi belanja, dan kinerja BUMD seperti kasus yang terjadi di Bank Jatim. “Kami mendorong agar laporan tindak lanjut atas rekomendasi DPRD dan LHP BPK disampaikan secara berkala kepada legislatif untuk menjadi bahan evaluasi dalam dokumen anggaran perubahan 2025,” jelas Lilik.

Terkait sisa anggaran tahun 2024, Fraksi PKS mendesak optimalisasi anggaran tersebut dalam APBD Perubahan 2025 untuk program-program strategis seperti pendidikan, pemenuhan gizi, penurunan stunting di 20 kabupaten/kota, serta peningkatan belanja modal dan ketahanan keluarga. Fraksi PKS berharap, seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan menjadi bahan perbaikan dan refleksi bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kinerja untuk kesejahteraan masyarakat.

## FRAKSI PKS JATIM DUKUNG RAPERDA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK, DORONG REGULASI YANG KOMPREHENSIF DAN ADAPTIF



Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Timur menyatakan dukungan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak yang diajukan oleh Komisi E DPRD Jatim. Dukungan ini disampaikan dalam rapat paripurna melalui juru bicaranya, Lilik Hendarwati, pada Rapat Paripurna DPRD Jatim, Senin (26/5).

Dalam pandangan resminya, Fraksi PKS menilai bahwa Raperda ini merupakan langkah penting dan strategis di tengah meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. "Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan, baik fisik maupun psikis, baik di dunia nyata maupun di ruang digital," ujar Lilik dalam. Fraksi PKS menyoroti bahwa fenomena kekerasan, khususnya di ranah digital seperti cyberbullying, eksploitasi daring, dan penyebaran konten berbahaya, semakin kompleks dan membutuhkan regulasi yang responsif terhadap perkembangan zaman.



Untuk itu, FPKS mendorong agar Raperda ini memuat ketentuan yang komprehensif dan adaptif terhadap tantangan digital, termasuk merujuk secara eksplisit pada Undang-Undang ITE yang terbaru. "Fraksi PKS mengusulkan agar perlindungan terhadap kekerasan digital dimasukkan dalam pasal-pasal yang spesifik dan memiliki dasar hukum yang kuat, agar tidak hanya fokus pada literasi, tetapi juga tindakan dan perlindungan konkret," tegas Ketua Fraksi PKS Jatim itu.

Lebih lanjut, Fraksi PKS juga mengkritisi belum tercantumnya secara rinci landasan yuridis atas penggabungan dua Perda lama, yakni Perda Nomor 16 Tahun 2012 dan Perda Nomor 2 Tahun 2014. Fraksi meminta kejelasan peraturan perundang-undangan terbaru mana yang menjadi rujukan dalam penyusunan Raperda ini agar tidak terjadi kekosongan hukum atau tumpang tindih. Dalam aspek hak ekonomi, sosial, dan budaya, Fraksi PKS juga meminta penjelasan lebih lanjut mengenai dasar hukum dan mekanisme implementasinya oleh Pemerintah Provinsi.

Termasuk di antaranya adalah perlindungan hak cuti melahirkan dan menyusui bagi perempuan pekerja serta akses pelayanan publik yang ramah perempuan dan anak di luar bidang pendidikan dan kesehatan. Fraksi PKS turut mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam merumuskan pasal-pasal yang menyangkut hubungan dalam keluarga dan pendidikan. "Pasal-pasal yang terkait ketahanan keluarga, peran pendidik, serta norma agama dan sosial harus disusun dengan kajian yang mendalam dan melibatkan para ahli," imbuh Lilik.

Meski memberikan sejumlah catatan, Fraksi PKS secara prinsip mendukung penuh pengajuan Raperda ini. Mereka berharap pembahasan dilakukan secara cermat dan inklusif dengan melibatkan para pemangku kepentingan, agar lahir sebuah produk hukum yang tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga aplikatif dan berpihak pada perempuan dan anak sebagai kelompok yang harus dilindungi negara. "Semoga Raperda ini dapat menjadi instrumen nyata kehadiran negara dalam menjamin rasa aman dan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Jawa Timur," pungkas Lilik.



Ketua Fraksi PKS  
DPRD Provinsi  
Jawa Timur

# **HJ. LILIK HENDARWATI**

**KOMISI C**  
**(KEUANGAN)**

**BADAN ANGGARAN (BANGGAR)**  
**BADAN MUSYAWARAH (BAMUS)**



## INOVASI KOMPOR BAHAN BAKAR JELANTAH DAN OLI BEKAS, LILIK HENDARWATI DORONG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KEPUTIH

Anggota DPRD Jawa Timur dari daerah pemilihan Surabaya, Lilik Hendarwati, mengapresiasi inovasi warga Keputih yang menciptakan kompor berbahan bakar alternatif dari oli bekas dan minyak jelantah. Inovasi ini dipresentasikan langsung oleh warga saat Lilik berkunjung atas undangan komunitas tersebut.



“Inovasi ini sangat menarik karena memanfaatkan limbah rumah tangga dan servis kendaraan bermotor, yang di Keputih cukup melimpah. Kalau dijual, nilainya kecil. Tapi kalau dimanfaatkan seperti ini, nilainya bisa jauh lebih besar,” ujar Ketua Fraksi PKS Jatim itu.

Dari satu liter oli bekas, kompor hasil karya warga Keputih ini mampu menyala hingga delapan jam. Menurut Lilik, ini merupakan potensi besar bagi kegiatan pemberdayaan masyarakat, terutama dalam menciptakan produk bernilai ekonomi dari barang yang selama ini dianggap sampah.

“Tentu saya mendorong dan memotivasi mereka agar ini bisa jadi kegiatan pemberdayaan yang menghasilkan. Tapi kompor ini tetap harus disempurnakan agar sesuai dengan target dan peruntukannya, sehingga layak untuk dipasarkan dan punya nilai jual tinggi,” tambah politisi PKS tersebut.

Lilik juga mengingatkan pentingnya aspek legalitas sebelum produk ini dipasarkan. Ia menegaskan bahwa izin dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) harus dikantongi terlebih dahulu. “Mereka sedang proses mengurus izinnya sambil terus menyempurnakan produk,” jelasnya.

Lebih lanjut, Lilik menyebut para inovator ini siap menjalankan usahanya secara serius dan berharap ada dukungan permodalan dari pemerintah. Ia pun berkomitmen untuk mendorong akses bantuan permodalan dan pelatihan lanjutan agar produk ini bisa berkembang lebih luas. “Kalau didukung dan dikembangkan, ini bisa jadi solusi ekonomi kreatif berbasis lingkungan yang sangat dibutuhkan masyarakat kota,” tutupnya.

## GELAR TURNAMEN VOLI 'LILIK CUP' ANTARKAMPUNG DI SURABAYA, LILIK HENDARWATI: TAK SEKADAR RAGA, INI TENTANG RASA



Anggota DPRD Jawa Timur dari Dapil Surabaya, Lilik Hendarwati, resmi membuka Turnamen Bola Voli "Lilik Cup" pada Minggu (25/5) di Lapangan Volley Granting Baru Tengah Simokerto, Surabaya. Turnamen ini digelar antarkampung dan melibatkan masyarakat luas, khususnya komunitas Dulurnya Bu Lilik di berbagai wilayah Surabaya.

Berbeda dari kompetisi olahraga biasa, Lilik Cup digagas sebagai sarana membangun rasa kebersamaan, memperkuat silaturahmi, dan menghidupkan semangat gotong royong di tengah warga. Bagi Lilik, menjadi wakil rakyat bukan hanya soal duduk di ruang sidang dan menjalankan fungsi formal, tapi juga hadir nyata di tengah masyarakat.

“Hari ini kita adakan kompetisi bola voli antarwarga Surabaya, dari kampung ke kampung. Ini bukan hanya tentang membangun raga, tapi membangun rasa. Karena menjadi wakil rakyat itu bukan sekadar hadir di forum-forum resmi, tapi juga hadir menyatu bersama warga,” ujar Lilik saat membuka turnamen. Politisi PKS itu menegaskan bahwa kehadiran dirinya sebagai wakil rakyat harus bisa dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Melalui kegiatan seperti ini, ia ingin menjembatani berbagai lapisan masyarakat untuk berkumpul, bergerak, dan berbagi semangat positif.

“Semangat hari ini adalah membangun sportivitas, membangun silaturahmi, dan membangun kekeluargaan di antara masyarakat Surabaya yang semuanya adalah Dulurnya Bu Lilik,” imbuh Ketua Fraksi PKS di DPRD Jatim itu. Turnamen ini tidak hanya menjadi ajang adu strategi dan kekuatan di lapangan, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan semangat kebersamaan dari level akar rumput. Berlangsung di lingkungan kampung, turnamen ini disambut meriah oleh warga dari berbagai usia dan latar belakang.

“Melalui Lilik Cup, saya ingin membuktikan bahwa dari lapangan kecil di kampung, bisa lahir solidaritas besar untuk Jawa Timur yang lebih kuat. Karena wakil rakyat itu bukan hanya bicara, tapi juga bergerak bersama,” tegas Lilik. Dengan mengusung slogan “Bu Lilik Hadir. Bu Lilik Dukung. Bu Lilik Dulure Sampeyan,” turnamen ini menjadi simbol dari pendekatan politik yang membumi dan membaur dengan denyut kehidupan rakyat. Lilik berharap kegiatan semacam ini akan menjangkau lebih banyak kampung di Surabaya, mengajak masyarakat untuk sehat, kuat, sportif, dan tetap guyub rukun.



Sekretaris Fraksi PKS  
DPRD Provinsi  
Jawa Timur

# DRH.H. PUGUH WIJI PAMUNGKAS, MM

**KOMISI E**

(KESRA)

BADAN KEHORMATAN (BK)





## **SATGAS PREMANISME DIAPRESIASI, PUGUH DPRD JATIM: ANGIN SEGAR UNTUK DUNIA USAHA**

Langkah pemerintah pusat membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan mendapat apresiasi dari Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas. Sekretaris Fraksi PKS Jatim itu menilai, keberadaan satgas ini menjadi sinyal positif bagi dunia usaha yang selama ini kerap resah dengan maraknya aksi premanisme di berbagai daerah.

“Pembentukan Satgas ini adalah langkah tepat yang patut diapresiasi. Ini menjadi angin segar, khususnya bagi para pelaku usaha dan investor yang membutuhkan jaminan keamanan dan kenyamanan dalam beraktivitas,” ujar Puguh. Satgas tersebut dibentuk melalui rapat koordinasi lintas kementerian yang digelar oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemendagri). Tujuannya adalah untuk menjamin kebebasan beraktivitas masyarakat serta menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif.

Menurut Puguh, fenomena premanisme akhir-akhir ini semakin meresahkan. Selain mengganggu ketertiban sosial, aksi-aksi preman seperti pemalakan, intimidasi, dan kekerasan juga berdampak langsung pada dunia usaha dan pemerintahan. “Premanisme bukan hanya masalah kriminal, tapi sudah menjadi hambatan struktural bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi,” tegasnya.

Puguh juga menyoroti pemberitaan media asing South China Morning Post yang merilis artikel berjudul "Indonesia's EV revolution held hostage by 'preman' gangster problem". Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa preman menjadi salah satu tantangan utama dalam menjadikan Indonesia sebagai pusat industri mobil listrik di kawasan ASEAN. Data dari Polri menunjukkan, selama pelaksanaan Operasi Kepolisian Kewilayahan sejak 1 Mei 2025, tercatat 3.326 perkara telah ditangani. Beberapa kasus menonjol di antaranya terjadi di Subang, Tangerang, Banten, Kalteng, dan Jakarta Selatan, dengan jumlah pelaku yang diamankan mencapai ratusan orang.

Di wilayah Jawa Timur, Polda Jatim mencatat 224 kasus premanisme berhasil diungkap hanya dalam waktu satu minggu, dari 1 hingga 8 Mei 2025. Kasus-kasus tersebut meliputi penganiayaan, pemerasan, gangsterisme, pungli, kekerasan antar perguruan pencak silat, hingga tawuran kelompok. "Meski aparat sudah melakukan penindakan, kelompok-kelompok ini terus bermunculan seperti jamur di musim hujan. Kebebasan berserikat dalam demokrasi sering disalahgunakan menjadi aksi yang meresahkan," ujarnya.

Puguh menambahkan bahwa di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu akibat konflik dan kebijakan dagang internasional, serta sejumlah regulasi dalam negeri yang dinilai belum pro-industri, upaya memberantas premanisme harus dibarengi dengan reformasi kebijakan yang berpihak pada dunia usaha. "Kalau Presiden Prabowo mencanangkan target pertumbuhan ekonomi 8 persen, maka stabilitas dan kepastian hukum adalah kunci. Satgas ini harus menjadi bagian dari strategi nasional menuju kemajuan ekonomi yang inklusif," tuturnya.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa dunia usaha mendapatkan ruang tumbuh yang sehat. Jika usaha tumbuh, maka efek berantai terhadap kesejahteraan masyarakat akan terjadi secara alami. "Memberantas premanisme bukan sekadar soal keamanan, tapi bagian dari membangun fondasi kemakmuran nasional," pungkash Puguh.

**“Salah satu isu yang mereka angkat adalah kekhawatiran soal sulitnya lapangan kerja setelah lulus. Ini menjadi perhatian serius karena mahasiswa hari ini adalah calon tenaga kerja yang juga akan terdampak langsung oleh tren pengangguran yang terus meningkat,” jelasnya.**



## **TERIMA KUNJUNGAN UNJANI, PUGUH DPRD JATIM SOROTI KEKHAWATIRAN MAHASISWA TERKAIT DENGAN PENGANGGURAN**

Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menyoroti keresahan mahasiswa terhadap persoalan pengangguran yang semakin mengkhawatirkan. Ini diungkap setelah ia menerima kunjungan ratusan mahasiswa dari Universitas Jenderal Ahmad Yani (Unjani) Cimahi, Jawa Barat, serta Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya, di Ruang Paripurna DPRD Jatim pada Rabu (21/5).

“Alhamdulillah, saya mewakili DPRD Jawa Timur menyambut baik kunjungan dari Unjani dan Untag. Mereka datang untuk memperdalam literasi seputar ilmu pemerintahan, khususnya memahami tugas pokok dan fungsi anggota DPRD. Diskusi berlangsung sangat dinamis dan penuh antusiasme,” ujar Sekretaris Fraksi PKS Jatim itu.

Namun di balik semangat akademik itu, Puguh mengungkapkan adanya keresahan dari kalangan mahasiswa mengenai tantangan dunia kerja, khususnya ancaman pengangguran dan peningkatan kasus pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sebagai bentuk langkah antisipatif, Puguh menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan berbagai program, di antaranya penyediaan Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di 16 titik di seluruh wilayah Jatim.

“Kami di DPRD terus mendorong penguatan pelatihan vokasional agar generasi muda tidak hanya siap memasuki dunia kerja, tapi juga mampu menciptakan lapangan kerja sendiri,” imbuhnya.

Ia berharap kegiatan ini menjadi sarana edukasi sekaligus refleksi bersama antara legislatif dan generasi muda, untuk bersama-sama merumuskan solusi atas tantangan ketenagakerjaan yang kian kompleks.

“Kunjungan ini bukan sekadar ajang belajar, tapi juga bagian dari kontribusi membentuk generasi penerus bangsa yang siap bersaing dan menjawab tantangan zaman,” pungkas Puguh



Bendahara Fraksi PKS  
DPRD Provinsi  
Jawa Timur

**HARISANDI SAVARI,  
S.PT, ST**

**KOMISI D**

**(PEMBANGUNAN)**

**BADAN MUSYAWARAH (BAMUS)**





**BANJIR DI  
PAMEKASAN  
RENDAM  
RIBUAN  
RUMAH,  
HARISANDI  
SAVARI DESAK  
AKSI NYATA  
PEMROV  
JATIM**

Hujan deras yang mengguyur wilayah Pamekasan pada Senin (12/5) dini hari menyebabkan banjir yang merendam ribuan rumah warga, menjadi perhatian khusus bagi anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PKS dapil Madura, Harisandi Savari. Ia menjelaskan, data sementara yang dihimpun BPBD Pamekasan mencatat lebih dari 1.000 kepala keluarga terdampak banjir akibat meluapnya Kali Juombang dan Semajid.

Banjir terjadi karena sungai yang melintasi wilayah Pamekasan tidak mampu menampung derasnya debit air, sehingga meluap ke pemukiman warga. Tercatat ada enam kelurahan dan satu desa yang terdampak, yaitu Kelurahan Patemon, Jungcangcang, Kangeran, Parteker, Barurambat Kota, Barurambat Timur, serta Desa Laden.

“Untuk ketinggian air banjir bervariasi, mulai dari setinggi lutut hingga perut orang dewasa. Alhamdulillah perlahan sudah surut,” ujar legislator PKS itu. Harisandi menyoroti perlunya penanganan serius terhadap persoalan banjir perkotaan di Pamekasan. Ia menegaskan bahwa pembangunan dan normalisasi sungai utama yang menjadi penyebab banjir merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sementara Pemerintah Kabupaten hanya memiliki kewenangan atas sungai-sungai berskala lokal.

“Sebenarnya sudah dilakukan. Tapi tidak cukup sampai di sini ternyata. Pak Wagub beberapa waktu lalu juga telah meninjau sungai dan meminta normalisasi DAS yang menjadi kewenangan provinsi. Kita tunggu aksi nyata pemerintah provinsi,” tegasnya. Haris berharap Pemprov Jatim segera mengambil langkah konkret dan berkelanjutan untuk menormalisasi aliran sungai serta memperkuat sistem drainase di kawasan rawan banjir agar kejadian serupa tidak terulang setiap musim hujan.



## **46 RIBU RUMAH DI JATIM BELUM TERALIRI LISTRIK, HARISANDI SAVARI DESAK PERCEPATAN ELEKTRIFIKASI**



Jawa Timur, sebagai salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di Indonesia, ternyata masih menghadapi persoalan mendasar dalam bidang energi. Sebanyak 46 ribu rumah tangga di provinsi ini belum menikmati akses listrik. Hal ini diungkap oleh Juru Bicara Komisi D DPRD Jawa Timur, Harisandi Savari, dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (26/5/2025). Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyatakan keprihatinannya atas lambannya pemerataan listrik, khususnya di daerah terpencil. Kabupaten Banyuwangi menjadi wilayah dengan jumlah terbanyak rumah tanpa listrik, mencapai 9.000 unit.

"Ini harus jadi perhatian serius. Dinas ESDM perlu meningkatkan anggaran pengadaan listrik untuk masyarakat tidak mampu, terutama di daerah terpencil dan pedesaan. Target Jawa Timur bebas rumah tanpa listrik harus segera diwujudkan," tegas Harisandi. Ia juga mendorong adanya kolaborasi anggaran antara Dinas ESDM Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota agar upaya elektrifikasi bisa lebih efektif dan merata, terutama di wilayah yang rasio elektrifikasinya masih rendah.

**“Jangan sampai izin tambang diberikan tanpa memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan. Harus benar-benar selektif dan ketat pengawasannya,” ujarnya.**



Tak hanya soal elektrifikasi, Harisandi juga menyoroti isu pertambangan di Jawa Timur. Ia mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 322 Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang tersebar di berbagai daerah, mencakup hampir 7.000 hektare. merujuk pada beberapa kasus perizinan tambang yang dinilai bermasalah, termasuk di Ponorogo.

Lebih jauh, Harisandi juga mengingatkan soal ancaman perubahan iklim akibat ketergantungan Jatim pada energi fosil, terutama batu bara. Ia menyebut PLTU Paiton dan pembangkit serupa sebagai penyumbang utama emisi karbon di Jawa Timur, yang berkontribusi hingga 222,2 juta ton CO<sub>2</sub>, angka tertinggi di Indonesia. “Pemerintah harus mulai serius menggeser kebijakan energi ke arah yang lebih berkelanjutan. Jangan sampai ambisi pembangunan justru meninggalkan warisan lingkungan yang rusak,” pungkasnya



Anggota Fraksi PKS  
DPRD Provinsi  
Jawa Timur

# **H AGUS CAHYONO, SHI, MHI**

**KOMISI A**  
**(PEMERINTAHAN)**

**BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN  
DAERAH (BAPEMPERDA)**



Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PKS, Agus Cahyono, mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera turun tangan menangani banjir dan longsor yang melumpuhkan sejumlah wilayah di Kabupaten Trenggalek sejak Senin (19/5). "Beberapa titik di Trenggalek lumpuh akibat banjir. Air menggenang dengan ketinggian bervariasi, bahkan di beberapa lokasi mencapai setinggi dada. Pemerintah provinsi harus segera hadir dengan bantuan nyata di lapangan," tegas Agus, Selasa (20/5).

Menurutnya, banjir melanda wilayah yang cukup luas, mulai dari Kecamatan Kota, Trenggalek, Pogalan, Gandusari, Kampak, hingga sebagian Durenan. Selain banjir, tanah longsor juga terjadi di Kecamatan Bendungan, Desa Depok, yang menyebabkan akses tertutup dan dilaporkan tiga rumah tertimpa.

A portrait of Agus Cahyono, a man with a beard and mustache, wearing a black cap and a grey suit jacket over a white shirt. He is looking slightly to the right.

**TRENGGALEK  
LUMPUH DITERJANG  
BANJIR, AGUS  
CAHYONO DPRD  
JATIM MINTA  
PEMROV GERAK  
CEPAT**

"Informasinya ada enam warga yang hilang dan belum ditemukan hingga tadi malam. Ini bukan bencana kecil. Penanganannya harus cepat dan terkoordinasi," tambah Anggota DPRD dari dapil 9 yang meliputi Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Magetan dan Ngawi itu. Agus juga menyoroti kebutuhan mendesak di lapangan, terutama penyediaan dapur umum bagi warga yang tak bisa memasak akibat rumah terendam. Di titik-titik longsor, ia menyebut diperlukan segera alat berat untuk membuka akses jalan.

Ia menegaskan bahwa bencana ini merupakan dampak dari curah hujan yang sangat tinggi selama sepekan terakhir. Hujan turun hampir setiap hari dan merata di seluruh wilayah Trenggalek, membuat volume air meningkat drastis hingga menyebabkan tanggul-tanggul sungai jebol. "Setelah banjir surut, jangan lupa ada pekerjaan besar: bersih-bersih. Sekolah-sekolah, pasar, dan fasilitas umum lainnya perlu dibantu. Warga mungkin bisa membersihkan rumahnya sendiri, tapi untuk fasilitas umum butuh dukungan pemerintah," ujarnya.

Agus juga menekankan pentingnya solusi jangka panjang seperti normalisasi sungai dan penguatan tanggul. Ia menyoroti semakin cepatnya pendangkalan sungai akibat sedimentasi dari hulu. "Penghijauan di lereng bukit juga penting. Saat ini banyak lahan miring yang beralih fungsi dari tanaman keras ke palawija, sehingga tidak mampu menahan air saat hujan deras," jelasnya.

Lebih lanjut, ia meminta pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan Bendungan Bagong yang bersumber dari APBN sebagai upaya antisipatif jangka panjang. "Pemerintah provinsi harus segera berkoordinasi dengan Pemkab Trenggalek, Basarnas, dan semua elemen terkait. Respon cepat adalah kunci penyelamatan dan pemulihan," pungkas Agus.



## **PERDA KHUSUS TENTANG JUDOL DAN PINJOL KANDAS, AGUS CAHYONO DORONG LEWAT TRANTIB**

Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memiliki Peraturan Daerah (Perda) khusus terkait judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) harus kandas akibat belum adanya regulasi dari pemerintah pusat. Sebagai gantinya, DPRD Jawa Timur melalui Komisi A memutuskan untuk memasukkan isu tersebut ke dalam revisi Perda Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Trantib).

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Agus Cahyono, mengungkapkan bahwa inisiasi awal sebenarnya adalah membentuk perda tersendiri tentang judol dan pinjol. Namun, hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan bahwa belum tersedia pijakan regulasi dari pusat yang memadai untuk itu.

“Terkait dengan inisiasi Komisi A, yaitu raperda tentang perubahan Perda Trantib, di mana poinnya kita memasukkan bab atau judul tentang judol dan pinjol, yang sebetulnya di awal-awal rapat di Komisi A kita ingin mengajukan raperda pinjol dan judol itu berdiri sendiri. Tetapi hasil konsultasi ke Kemendagri karena belum ada pijakan regulasi dari pusat, maka diputuskan dimasukkan ke perda yang sudah ada, yaitu Perda tentang Trantib,” jelas Agus.

**“Di perjalanan diskusi kemarin, kita tidak membahas tentang sanksi, karena itu di luar kewenangan Pemprov Jawa Timur. Penegakan hukum terkait judol dan pinjol itu ada di instansi lain. Kita lebih kepada antisipasi, lebih kepada pencegahan, dengan literasi, bekerja sama dengan beberapa instansi yang relevan untuk melakukan edukasi kepada masyarakat Jawa Timur”.**



Ia menegaskan bahwa isi dari bab judol dan pinjol dalam Perda Trantib lebih mengarah pada aspek pencegahan, bukan penindakan. “Apa bentuk-bentuk pencegahan? Di antaranya literasi kepada masyarakat terkait bahaya judol dan pinjol, yang nanti akan bermitra dengan OPD terkait,” imbuh legislator PKS itu. Tak hanya itu, Agus juga mendorong agar materi terkait bahaya judol dan pinjol dapat dimasukkan dalam kurikulum pendidikan tingkat SMA dan SMK, sektor pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Termasuk kita bisa memasukkan ke dalam kurikulum pendidikan SMA dan SMK yang menjadi kewenangan Pemprov, yang isinya juga menyinggung soal judol dan pinjol. Intinya adalah pencegahan, bagaimana sejak dini masyarakat Jatim mendapatkan literasi tentang judol dan pinjol,” terang mantan Wakil Ketua DPRD Trenggalek ini.

Agus juga menegaskan bahwa pembahasan di Komisi A sama sekali tidak menyentuh soal sanksi. Dengan masuknya substansi pencegahan judol dan pinjol dalam Perda Trantib, diharapkan masyarakat Jawa Timur dapat lebih waspada serta memahami risiko dan bahaya praktik-praktik ilegal tersebut sejak dini.



Anggota Fraksi PKS  
DPRD Provinsi  
Jawa Timur

# **DRS. H. M KHUSNUL KHULUK**

**KOMISI B**

**(PEREKONOMIAN)**

**BADAN ANGGARAN (BANGGAR)**



## JELANG IDUL ADHA, KHUSNUL DPRD JATIM MINTA PENGAWASAN HEWAN TERNAK DIPERKETAT

Menjelang Hari Raya Idul Adha, Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Khusnul Khuluk, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperkuat pengawasan terhadap distribusi dan kesehatan hewan ternak, terutama yang berasal dari luar wilayah Jatim. Menurutnya, perlu ada antisipasi dini agar hewan yang berpotensi membawa penyakit tidak masuk ke Jawa Timur.

Ia juga menyoroti masih lemahnya pemeriksaan hewan di pasar-pasar tradisional. Khusnul meminta agar Pemprov menggandeng dinas terkait serta dokter hewan di kabupaten/kota untuk meningkatkan intensitas pemeriksaan hewan kurban. "Pemeriksaan di pasar-pasar hewan belum diintensifkan. Harus melibatkan beberapa dokter hewan di kabupaten setempat," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mendorong agar monitoring dan evaluasi juga dilakukan pada hari H pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Hal ini penting untuk memastikan daging yang dikonsumsi masyarakat benar-benar aman. "Monitoring atau monev bisa dilakukan di beberapa tempat pemotongan hewan, sehingga kalau ada hal yang kurang bagus bisa langsung disampaikan ke masyarakat untuk tidak dikonsumsi," tutupnya.



**"Menjelang Idul Qurban, pengawasan terhadap hewan ternak, terutama dari luar Jawa Timur yang memang ada indikasi penyakit, harus diantisipasi untuk tidak masuk," (7/5/2025).**

# FRAKSI PKS JAWA TIMUR



[www.fraksipksjatim.id](http://www.fraksipksjatim.id)



fraksipksjatim